

Ketua DPR: Fasilitas Isolasi Khusus Anggota Dewan Belum Diperlukan

JAKARTA (IM) - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani meminta Sekretaris Jenderal (Setjen) DPR untuk mengevaluasi fasilitas isolasi mandiri di hotel bagi anggota dewan dan pegawai. Ia menilai, kebijakan terkait fasilitas tersebut belum diperlukan. "Melihat kondisi saat ini, penyediaan fasilitas isolasi terpusat khusus karyawan, perangkat, maupun anggota DPR belum perlu dilakukan," kata Puan, dalam keterangan tertulis, Jumat (30/7).

Puan meminta Setjen DPR untuk berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 serta fasilitas kesehatan dan fasilitas umum lain yang menyediakan isolasi terpusat. Hal ini untuk mengantisipasi kebutuhan layanan kesehatan dari pasien Covid-19 yang sehari-hari bekerja di lingkungan DPR "Jadi

kalau ada pasien Covid-19 dari karyawan, perangkat maupun anggota DPR yang mengalami pemburukan kondisi, bisa segera teratasi," kata Puan.

Sementara menurut Sekjen DPR Indra Iskandar, kebijakan fasilitas isoman di hotel untuk anggota dewan masih dalam peninjauan dan belum diimplementasikan. "Kami tetap fokus yang sedang berjalan di Wisma Kopo sambil menyempurnakan layanan-layannya di sana," kata Indra saat dihubungi wartawan, Jumat (30/7).

Indra mengatakan, selama ini Wisma Kopo sudah difungsikan sebagai tempat isoman. Namun, fasilitas yang ada perlu menyempurnakan. "DPR masih punya Wisma di Kopo dan itu selama ini sudah dimanfaatkan. Layanan di sana akan disempurnakan," tuturnya. ● han

Penanganan Pandemi Tak Efektif Tanpa Peningkatan Testing dan Tracing

JAKARTA (IM) - Ketua Komisi IX DPR Felly Estelita Runtuwene mengatakan, tanpa ada peningkatan testing dan pelacakan (tracing) di masyarakat, penanganan pandemi Covid-19 tidak akan optimal.

Menurutnya, kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat mulai dari pembatasan sosial berskala besar (PSBB) hingga pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) tidak akan efektif bila tidak dibarengi dengan testing dan tracing yang masif.

"Kami tidak henti-hentinya mengingatkan pemerintah agar meningkatkan testing ini sebagai prasyarat agar penanganan pandemi bisa lebih efektif lagi," kata Felly, dikutip dari situs DPR, Jumat (30/7).

"Kita sudah adakan PPKM,

PSBB, dan sebagainya, tapi kalau tidak dibarengi dengan testing dan tracing saya kira tidak akan maksimal," kata Felly.

Ia mengatakan, Indonesia hanya melakukan tes kepada 66.807 orang per 1 juta orang. Angka tersebut jauh di bawah Malaysia yang melakukan tes kepada 417.767 orang per 1 juta orang. Kemudian, Thailand melakukan tes kepada 116.190 orang per 1 juta orang.

Politisi Partai Nasdem itu menuturkan, pihaknya juga memantau positivity rate harian dan seminggu terakhir, khususnya positivity rate hasil PCR, yang berada di atas angka 40 persen. "Angka ini menunjukkan saat ini ada penularan yang tinggi di masyarakat," ujar Felly.

Felly mendorong pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan, agar serius meningkatkan testing dan tracing. Ia mengatakan, perlu ada kerja-kerja yang terstruktur dalam penanganan pandemi Covid-19, sehingga tidak berkepanjangan dan ekonomi bisa segera pulih. "Sekali lagi kami sampaikan tanpa ada peningkatan testing dan tracing, maka penanganan pandemi tidak akan optimal. Karena kita tidak mengetahui secara riil jumlah kasus positif dan kebijakan PPKM tidak akan bisa berjalan efektif," kata Felly. ● han

2 | Polhukam



SIDANG PENGUJIAN MATERIIL UU KPK

Hakim Konstitusi Anwar Usman (tengah), Aswanto (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin sidang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (30/7). Sidang tersebut beragendakan pengucapan ketetapan perkara.

KY Coret Nama Hakim yang Adili Pinangki dari Bursa Hakim Agung

Selain menyunat hukuman Jaksa Pinangki, Reny juga menjadi majelis hakim yang memotong hukuman pembobol Jiwasraya Syahmirwan dan beberapa kasus lainnya.

JAKARTA (IM)-Komisi Yudisial (KY) mencoret nama Reny Halida Ilham Malik dari bursa calon hakim agung.

Diketahui bahwa Reny merupakan salah satu hakim yang menyunat hukuman jaksa Pinangka Sirna Malasari dari 10 tahun penjara menjadi 4 tahun penjara di tingkat banding.

Hal itu diumumkan KY dalam Zoom Meeting pada Jumat (30/7). Awalnya, nama Reny masuk 27 nama calon hakim agung kamar pidana dan

lolos seleksi kualitas. Namun setelah dilakukan tes kepribadian dan kesehatan, nama Reny kandas.

Sebagaimana diketahui, pengurangan vonis Pinangki dilakukan oleh lima hakim tinggi secara bulat. Mereka yaitu Muhammad Yusuf, Haryono, Singgih Budi Prakoso, Lafat Akbar, dan Reny Halida Ilham Malik.

Reny terlibat dalam sunat vonis pembobol Jiwasraya yaitu Kepala Divisi Investasi dan

Keuangan Asuransi Jiwasraya, Syahmirwan. Majelis Pinangki yang menyunat hukuman Syahmirwan dari seumur hidup menjadi 18 tahun penjara.

Reny juga menganulir hukuman penjara seumur hidup pembobol Jiwasraya, Joko Hartono Tirta menjadi 18 tahun penjara. Juga mantan Direktur Keuangan Hary Prasetyo, dari penjara seumur hidup menjadi 20 tahun penjara.

Tidak hanya itu, Reny juga menyunat hukuman mantan Dirut Jiwasraya, Hendrisman Rahim. Awalnya, Hendrisman dihukum penjara seumur hidup. Tapi oleh Reny dkk vonis Hendrisman disunat menjadi 20 tahun penjara.

Terakhir, Reny terlibat dalam menyunat vonis Pinangki dari 10 tahun penjara men-

jadi 4 tahun penjara dan DT dari 4,5 tahun penjara menjadi 3,5 tahun penjara.

Berikut ini 15 nama yang lolos tes kepribadian-kesehatan dan bisa maju ke tes berikutnya: Achmad Setyo Pudjoharsoyo (Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Kendari, Adly (Hakim PN Jambi), Artha Theresia Silalahi (Hakim PT Jakarta), Catur Inantoro (Hakim PT Tanjung Karang), Dwiarso Budi Santiaro (Kepala Badan Pengawasan MA), Eddy Parulian Siregar (Hakim PT Ambin), Hermansya (Dosen FH Universitas Tanjungpura), Aviantara (Inspektur Badan Pengawas MA), Dery Supriyono (Wakil Ketua PT Gorontalo), Jupriyadi (Hakim di Bawas MA).

Kemudian Prim Haryadi (Dirjen Badan Peradilan Umum), Subiharta (Hakim PT Bandung),

Suharto (Panitera Muda Pidana Khusus MA), Suradi (Hakim di Bawas MA), Yohanes Priyana (Hakim PT Kupang).

Adapun calon hakim agung yang lulus untuk kamar perdata yaitu: Berlian Napitupulu (Hakim PT Jambi), Ennid Hasanuddin (Hakim PT Banten), Fauzan (Hakim PHI MA), Haswandi (Panitera Muda Perdata Khusus MA), Mochamad Hatta (Ketua PT Palangkaraya), Raden Murjiyanto (Dosen F Universitas Janabradra).

Untuk kamar militer, yaitu: Brigjen TNI Slamet Sarwo Edy (Ketua Pengadilan Militer Tinggi Jakarta), Brigjen TNI Tama Ulinta (Wakil Kepala Pengadilan Militer Utama), Brigjen TNI Tiarsen Buatun (Kepala Sekolah Tinggi Hukum Militer Dikumat). ● han

indonet
business enabler

LAPORAN KEUANGAN PT INDOINTERNET TBK

Kantor Pusat:
Jl. Rempoa Raya No. 11
Rempoa, Ciputat Timur
Tangerang Selatan 15412
Telepon: (021) 7388 2525
Faksimili: (021) 7388 2626
Email: corporate.secretary@indonet.id
Situs web: www.indonet.co.id

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 30 Juni 2021 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)			LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPRESIF LAIN KONSOLIDASIAN Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2021 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)			LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2021 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)		
	30 Juni 2021	31 Desember 2020		Periode yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2021	Periode yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2020		Periode yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2021	Periode yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2020
ASET			LIABILITAS DAN EKUITAS			OPERASI YANG DILANJUTKAN		
ASET LANCAR			LIABILITAS JANGKA PENDEK			PENDAPATAN USAHA	290.355	226.211
Kas dan setara kas	308.423	105.729	Utang usaha	174.374	151.340	BEBAN POKOK PENDAPATAN	202.874	146.862
Piutang usaha, neto			Pinhak ketiga	2.167	2.220	LABA BRUTO	87.481	79.349
Pinhak ketiga	65.526	55.634	Pinhak berelasi	702	1.508	Beban penjualan	(22)	(53)
Pinhak berelasi	4.924	2.934	Utang lain-lain pihak ketiga	1.736	2.722	Beban umum dan administrasi	(21.917)	(18.876)
Piutang lain-lain pihak ketiga	89	234	Liabilitas sewa	702	1.508	Beban operasi lainnya	(460)	(189)
Pajak dibayar di muka	48.577	13.565	Utang pajak	12.971	15.717	Pendapatan operasi lainnya	3.108	267
Biaya dibayar di muka	11.021	8.963	Biaya masih harus dibayar	106.051	21.984	LABA USAHA	68.190	60.498
Dana yang dibatasi penggunaannya	1.212	1.193	Pendapatan diterima di muka	14.921	12.719	Pendapatan bunga	4.045	4.049
Aset lancar lain-lain	2.835	3.135	TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	312.922	208.210	Lain-lain	(62)	(62)
TOTAL ASET LANCAR	442.607	191.387	LIABILITAS JANGKA PANJANG			LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	72.173	64.485
ASET TIDAK LANCAR			Penyisihan imbalan kerja karyawan	16.970	16.176	DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN		
Biaya dibayar di muka	34	76	LIABILITAS	329.892	224.386	BEBAN PAJAK PENGHASILAN		
Estimasi tagihan pajak	5.160	5.160	EKUITAS			Kini	(17.725)	(14.572)
Aset pajak tangguhan, neto	3.268	2.496	Modal saham - nilai nominal Rp50 per saham			Tanggunghan	772	(609)
Aset tetap, neto	839.870	333.949	Modal dasar - 1.200.000.000 saham			BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(16.953)	(15.181)
Aset tak berwujud, neto	-	62	Modal ditempatkan dan disetor penuh - 404.050.000 saham			LABA DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN	55.220	49.304
Goodwill	2.020	1.662	(2020: 323.240.000 saham)			OPERASI YANG DIHENTIKAN		
Aset tidak lancar lain-lain	2.020	1.662	20.203	20.203	16.162	Labanya setelah beban pajak penghasilan dari operasi yang dihentikan	-	3.398
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	850.410	343.463	Tambahan modal disetor	582.611	(9.323)	LABA PERIODE BERJALAN	55.220	52.702
TOTAL ASET	1.293.017	534.850	Modal ditempatkan dan disetor penuh - 404.050.000 saham			PENGHASILAN KOMPRESIF LAINNYA	-	-
			(2020: 323.240.000 saham)			TOTAL PENGHASILAN KOMPRESIF PERIODE BERJALAN	55.220	52.702
			20.203	20.203	16.162	Labanya periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada:		
			582.611	582.611	(9.323)	Pemilik entitas induk	55.387	52.848
			(5.971)	(5.971)		Kepentingan non-pengendali	(167)	(146)
			3.232	3.232	358.752	Total	55.220	52.702
			358.752	303.366	958.827	Total penghasilan komprehensif periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada:		
			958.827	307.466	327.669	Pemilik entitas induk	55.387	52.848
			307.466	307.466	317.815	Kepentingan non-pengendali	(167)	(146)
			307.466	307.466	317.815	Total	55.220	52.702
			307.466	307.466	317.815	Labanya per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada		
			307.466	307.466	317.815	pemilik entitas induk (dalam rupiah penuh)	152	163
			307.466	307.466	317.815			

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2021 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)							
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk							
	Saldo laba						
	Modal saham ditempatkan dan disetor penuh	Tambahan modal disetor	Penghasilan komprehensif lain	Ditentukan untuk cadangan umum	Belum ditentukan penggunaannya	Total	Total Ekuitas
Saldo 1 Januari 2020	16.162	-	(2.744)	-	301.541	314.959	2.856
Dampak penerapan standar akuntansi baru	-	-	-	-	(720)	(720)	-
Saldo 1 Januari 2020, disajikan kembali	16.162	-	(2.744)	-	300.821	314.239	2.856
Dividen kas	-	-	-	-	(26.000)	(26.000)	(26.000)
Dekonsolidasi entitas anak	-	-	(444)	-	-	(444)	(100)
Labanya periode berjalan	-	-	-	-	52.848	52.848	(146)
Selish nilai transaksi dengan entitas sepengendali	-	(5.024)	-	-	-	(5.024)	(5.024)
Saldo 30 Juni 2020	16.162	(5.024)	(3.188)	-	327.669	335.619	2.610
Saldo 1 Januari 2021	16.162	(9.323)	(5.971)	3.232	303.366	307.466	2.997
Penerbitan saham baru sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana	4.041	591.933	-	-	595.974	595.974	-
Penambahan investasi oleh kepentingan non-pengendali di entitas anak	-	-	-	-	-	-	1.468
Labanya periode berjalan	-	-	-	-	55.387	55.387	(167)
Saldo 30 Juni 2021	20.203	582.611	(5.971)	3.232	358.752	958.827	4.298

CATATAN:

- Informasi keuangan di atas diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian Interim untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 (tidak diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
- Informasi keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkono & Surja dengan opini wajar tanpa modifikasi sebagaimana tercantum dalam laporan mereka tertanggal 22 Maret 2021.

Tangerang, 30 Juli 2021

S.E & O

Direksi